



SIARAN PERS

Otorita Ibu Kota Nusantara

Nomor:266/sipers/sdmhumas-oikn/08/2024

06 Agustus 2024

Otorita IKN Gelar Rapat Penyampaian Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut Penataan Koridor Sepaku

NUSANTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Kepala Desa Suka Raja, Kepala Desa Bukit Raya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Raja, BPD Bukit Raya, dan masyarakat Sepaku gelar pertemuan pembahasan lanjutan dari hasil survei penataan koridor Sepaku, pada Senin malam (05/07/2024).

Koridor Sepaku berada di Wilayah Perencanaan (WP) II Barat IKN yang terletak di Pasar Rebo/ Pasar Sepaku yang berada di Desa Suka Raja dan Desa Bukit Raya. Penataan koridor Sepaku dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan perangkat desa terkait di Desa Suka Raja dan Desa Bukit Raya.

Berdasarkan hasil survei penataan koridor Sepaku yang melibatkan pedagang, pelanggan, pengguna jalan di sepanjang Jalan Pasar Sepaku serta Perangkat Desa Suka Raja dan Bukit Raya, diketahui beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, sebanyak 92% responden setuju untuk dilakukan perbaikan karena kondisi pasar yang belum ideal. Kedua, 97% responden setuju untuk dilakukan penataan koridor Pasar Sepaku karena kondisi pasar yang mengganggu dan menimbulkan kemacetan. Ketiga, sebanyak 97%, dari responden pedagang Pasar Sepaku menginginkan pengelolaan pasar yang lebih baik. Keempat, 98% responden pedagang Pasar Sepaku menginginkan dibangun drainase dan infrastruktur lainnya.

Sebelumnya, Kedeputian Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat (SBPM) Otorita IKN serta Kedeputian Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN telah memfasilitasi pelaksanaan survei yang dilakukan pada tanggal 22-28 Juli 2024 lalu. Survei ini melibatkan 140 responden dan menghasilkan beberapa kesimpulan penting yang menjadi dasar penataan lebih lanjut.

Deputi SBPM Otorita IKN, Alimuddin menjelaskan masyarakat berperan vital dalam menentukan penataan Koridor yang ada di Sepaku. "Pembangunan yang kita lakukan di Nusantara bersifat partisipatoris, artinya masyarakat diajak terlibat tidak hanya dalam perencanaan tetapi hingga pembangunannya, sehingga aspirasi masyarakat yang selama ini ada bisa tersalurkan secara jelas nantinya dalam eksekusi penataan Koridor di Sepaku," kata Alimuddin.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Bidang Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Conrita Ermanto juga menekankan teknis partisipatoris yang dilakukan dalam pendataan survei di tingkat masyarakat.

"Dalam survei yang dilakukan, pendataan diambil dari warga dan pedagang pasar yang terdampak. Tim surveyor yang terlibat juga berasal dari masyarakat lokal dengan didampingi BPD masing-masing," ujar Conrita.

Diharapkan pada Oktober 2024, perancangan untuk penataan Koridor Sepaku, khususnya Pasar Sepaku, telah selesai dan di awal 2025 pembangunan bisa dimulai. Langkah-langkah selanjutnya akan melibatkan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Rencana Induk Terintegrasi, serta Basic Design Infrastruktur Dasar dengan pendekatan partisipatif. Hal ini penting untuk memastikan semua kebutuhan dan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam rencana penataan tersebut.



Tim Pendukung Bidang Perencanaan Infrastruktur Bangunan Gedung, Permukiman, dan Perumahan dari Satuan Tugas Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Petra Putra mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya terjadi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), namun juga akan menysasar ke wilayah sekitar.

“Pembangunan Nusantara tidak hanya terbatas di KIPP, tetapi juga di sekitarnya. Sehingga dari hasil survei yang telah keluar ini, kami akan segera melakukan perencanaan sehingga penataan di Koridor Sepaku bisa terealisasi secepat mungkin,” ucap Petra.

Kepala Desa Suka Raja, Sugiyanto mengapresiasi langkah partisipatoris dari Otorita IKN untuk menghimpun dan mengakomodasi aspirasi warga dalam upaya penataan ini.

“Dari hasil survei yang dilakukan, mayoritas masyarakat menerima adanya penataan di Koridor Sepaku. Tentunya hal ini sangat diharapkan dan tentu semoga bisa terealisasi, sehingga masyarakat bisa menerima manfaatnya sebaik mungkin,” tutur Sugiyanto.

Perwakilan dari masyarakat yang diwakili oleh Ketua BPD Bukit Raya, Mirwan Kaso mengharapkan dari hasil survei ini nantinya penataan pusat ekonomi yang ada di Sepaku saat ini bisa menjadi penataan yang baik.

“Ketika nantinya menjadi ibu kota, penataan di daerah-daerah padat penduduk seperti di Pasar Sepaku diharapkan memiliki penataan yang lebih baik. Selain itu, kami juga diharapkan mendapat pemberitahuan ketika akan dilaksanakan implementasi penataan nantinya,” pungkask Mirwan

Penyampaian hasil survei ini menunjukkan komitmen Otorita IKN dan pemerintah daerah dalam meningkatkan serta mengedepankan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Sepaku melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif. Dengan semangat kolaboratif dan partisipatif, diharapkan penataan Koridor Sepaku dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Turut hadir juga dalam rapat ini Ketua BPD Desa Suka Raja, Jemanun; Perangkat Desa Bukit Raya dan Suka Raja; serta Masyarakat Desa Bukit Raya dan Suka Raja.

HUMAS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Kontak:

halo@ikn.go.id / humas@ikn.go.id

Website : ikn.go.id
Instagram : [instagram.com/ikn_id](https://www.instagram.com/ikn_id)
Facebook : [facebook.com/iknindonesia1](https://www.facebook.com/iknindonesia1)
Twitter : twitter.com/ikn_id
Youtube : IKN Indonesia

#KotaDuniauntukSemua
#Nusantara
#IbuKotaNegara

Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare. Nusantara akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat



NUSANTARA

SIARAN PERS

transformasi ekonomi negara. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) ialah otoritas yang mengelola dan mengatur Nusantara. Otorita IKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, bekerja langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Otorita IKN bertugas sebagai pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.

DOKUMENTASI FOTO
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara



